

SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-2015¹

Oleh:

Muhammad Zulfian Alif Utama²

Email: utamalif903@gmail.com

H.Hayari³

Email: hayari@uho.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terbentuknya pemerintahan Kabupaten Muna dan mendeskripsikan pemerintahan Kabupaten Muna tahun 1960 sampai 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsudin, dimana tata kerja metode ini adalah: (1) Pengumpulan sumber (Heuristik), (2) Kritik sumber (Verifikasi), (3) Penulisan sejarah (Historiografi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Muna menjadi jelas setelah diadakan musyawarah antar daerah se-Sulawesi Tenggara di Kendari yang dihadiri utusan dari Kewedanan Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Melalui musyawarah ini disepakati bahwa Kabupaten Sulawesi Tenggara harus diperjuangkan pemekarannya sebagai provinsi dengan didukung empat daerah tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Kabupaten Muna terbentuk pada tahun 1959 melalui Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan Kepala Daerah Tingkat II Muna yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus sebagai Bupati Muna yang pertama. (2) Pemerintahan Kabupaten Muna dalam perjalanannya selama 56 tahun (1960-2015) telah mengalami 11 kali pergantian Kepala Daerah Tingkat II sampai tahun 2015. Kepala Daerah Tingkat II yang menjabat secara berturut-turut yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus (1959-1960), Lettu Inf. M. Thalib (1961-1965), Drs. La Ode Rasyid (1965-1970), Drs. La Ute (1971-1973), Drs. La Ode Kaimuddin (1976-1980), Drs. La Ode Saafi Amane (1981-1985), Drs. Maola Daud (1986-1994), Kol. Saleh Lasata (1995-1997), Kol. Inf. H. Djamaluddin Bedu (1998-1999), Ridwan. BAE (2000-2010), dan dr. H. L. M. Baharuddin. M.Kes (2011-2015). Pada masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan, BAE terjadi pemekaran wilayah yaitu mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna. Pada masa pemerintahan dr. H. L.M. Baharuddin. M.Kes juga terjadi pemekaran yaitu mekarnya Muna Barat dari Kabupaten Muna.

Kata Kunci: Sejarah, Pemerintahan, Kabupaten Muna

PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu propinsi yang berada dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam wilayah propinsi ini terdapat berbagai suku diantaranya Muna, Buton, Tolaki, Moronene bahkan suku Bugis dan Jawa juga ada mereka berada di Sulawesi Tenggara karena program pemerintah yang bernama transmigrasi untuk mengurangi padatnya penduduk kota. Propinsi ini telah mengalami perkembangan yang pesat pada berbagai sektor yang disertai oleh perjalanan yang sangat panjang. Perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari hasil kerja keras dari para pemimpinnya yang bersinergi dengan rakyat sehingga tercapai pembangunan yang baik.

Setiap daerah memiliki sejarah perkembangan tersendiri, ada beberapa penelitian mengenai perkembangan suatu kabupaten, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hasrita (2006) mengenai perkembangan Kabupaten Kendari Tahun 1964-2003, yang mana dalam penelitiannya faktor terbentuknya sebuah kabupaten yakni, faktor kesejarah, faktor tidak meratanya

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah

³ Dosen FKIP UHO

pembangunan, rentang kendali pelayanan publik yang jauh serta tidak terakomodasinya representasi politik.

Kabupaten Muna merupakan salah satu pulau yang berada di jazirah Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara. Muna atau dalam bahasa Muna yaitu Wuna telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dimulai dari masa pra sejarahnya yang ditandai dengan lukisan-lukisan yang berada disitus gua Liang Kabhori lalu masa sejarah dan pada akhirnya terbentuk menjadi salah satu kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26/1959 dengan Ibu kota Raha yang terdiri atas empat distrik yaitu Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu.

Dengan terbentuknya secara resmi Muna dari kerajaan menjadi Kabupaten maka perlu diangkat seorang bupati sehingga pada tanggal 2 Maret 1960 La Ode Abdul Koedoes diangkat menjadi Bupati Muna yang pertama. Terjadi beberapa pergantian Bupati Muna setelah La Ode Abdul Koedoes. Beliau hanya memerintah kurang lebih satu tahun setelah itu beliau digantikan oleh Lettu Inf M. Thalib yang memerintah dari 11 November 1961 sampai 3 Desember 1965. Pemerintahan beliau diwarnai dengan berkecamuknya DI/TII dan PKI. Lalu beliau digantikan oleh La Ode Rasyid yang memerintah sejak 11 November 1965 sampai 3 Desember 1970. Setelah itu beliau digantikan oleh Drs. La Ute yang masa pemerintahannya dimulai 13 Desember 1970 sampai 22 April 1974. Drs. H. La Ode Kaimuddin muncul sebagai bupati Muna menggantikan bupati sebelumnya yang lama pemerintahannya dimulai sejak 22 April 1974 sampai 10 Maret 1981. Pada tanggal 10 Maret 1981 Drs. La Ode Saafi Amane resmi menjadi Bupati Muna menggantikan Drs. H. La Ode Kaimuddin hingga 10 Maret 1986 pemerintahannya berakhir. Kemudian beliau digantikan oleh Drs. Maola Daud memerintah dari tanggal 17 Maret 1986 sampai 1996. Selanjutnya Saleh Lasata yang memimpin Muna sejak 3 Oktober 1997 sampai 1999. Beliau kemudian digantikan oleh Kolonel Inf. H. Djamaluddin Bedu memerintah tahun 1999-2000.

Memasuki era reformasi Ridwan BAE tampil sebagai pemimpin Muna yang sekaligus dua periode berturut-turut yaitu tahun 2000 sampai 2005 kemudian 2005 sampai 2010. Dr. Baharudin muncul menggantikan Ridwan Bae memimpin Muna selama satu periode sejak 2011 sampai 2015. Pada tahun 2016 yang menjadi bupati di Kabupaten Muna adalah Rusman Emba dalam pemilihan ini kepala daerah dimasa ini terjadi pemilihan ulang tiga kali.

KAJIAN PUSTAKA

Memahami masa kini kita harus mengerti masa lalu, karena masa lalu adalah pangkal masa kini dan masa kini adalah ujung masa lalu serta masa yang akan datang merupakan muara dari masa sebelumnya (Gazalba, (1981: 8). Jika ingin melihat masa lalu maka sejarah hadir sebagai ilmu yang diperuntukkan untuk melihat segala sesuatu mengenai aktifitas masa lampau manusia dari berbagai aspek, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek yang lainnya. Sehingga dengan melihat masa lalu maka kita akan mampu memahami apa yang terjadi sekarang ini yang merupakan akibat dari masa lalu itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1999: 17) bahwa sejarah itu ibarat orang naik kereta yang menghadap kebelakang ia dapat melihat kebelakang, kesamping kanan dan kiri, kemudian sejarah adalah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh orang.

Berdasarkan hal tersebut kedudukan sejarah sangat penting dalam menelaah berbagai peristiwa, hal ini juga berlaku dalam menelaah pemerintahan. Secara tradisional, argument keberadaan pemerintahan daerah lebih dititik beratkan pada kepentingan untuk mengetahui kondisi daerah untuk menangani persoalan-persoalan daerah secara lebih efektif. Tujuan lainnya adalah bahwa dengan adanya pemerintahan daerah akan memungkinkan adanya interaksi yang efektif antara rakyat dan wakil-wakilnya ataupun dengan birokrasi pemerintahan daerah.

Perkembangan merupakan bagian dari pada ilmu sejarah yang lebih dikenal dengan istilah gerak sejarah. Segala perubahan dan perkembangan dalam banyak hal adalah disebabkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk hidup selalu cenderung untuk melakukan perubahan baik secara individu maupun secara kelompok. Kuntowijoyo (1999: 13) menjelaskan bahwa perkembangan terjadi bila berturut-turut masyarakat

bergerak dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Dengan demikian perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam periode waktu yang disertai dengan usaha-usaha tertentu untuk mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muna difokuskan pada pemerintahannya. Dimana dalam tahun 1960 hingga 2015 terjadi banyak peristiwa penting yaitu diantaranya mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna menjadi Kabupaten Buton Utara kemudian Muna Barat juga menjadi daerah otonom baru dengan nama Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural Leirissa (1996: 12), yang mempelajari peristiwa dan struktur sebagai kesatuan yang saling melengkapi artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat.

Sumber data penelitian terdib atas (1) sumber tertulis, yakni data yang diperoleh berupa data-data yang dikumpulkan dari buku, hasil penelitian, dan internet serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Muna pada tahun 1960 sampai tahun 2015; (2) sumber lisan, yakni data yang diperoleh melalui keterangan lisan atau wawancara dengan informan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat serta orang yang dianggap banyak mengetahui tentang sejarah pemerintahan Kabupaten Muna pada tahun 1960 sampai tahun 201 dan sumber visual, yakni data yang diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Muna.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur metode sejarah yang dikemukakan oleh Samsudin (2007: 17-239) yaitu: (1) Pengumpulan sumber (*Heuristik*) dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni menelaah buku-buku, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan judul dan masalah yang dikaji, pengamatan atau observasi, Wawancara, melakukan tanya jawab dengan informan yang dipercaya, studi dokumen dilakukan menelaah dokumen-dokumen tertulis tentang pembentukan Kabupaten Muna; (2) Kritik sumber, dilakukan untuk mevalidasi data dengan cara kritik intern, kritik internal; (3) Historiografi, dilakukan dengan tiga tahap yakni penafsiran, penjelasan dan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Muna Sebagai Pemerintahan

Pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka sehingga kerajaan-kerajaan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia meleburkan diri menjadi wilayah-wilayah administratif yang baru. Hal ini dialami pula oleh Muna yang pada waktu itu berada dalam wilayah Sulawesi Tenggara di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar. Seiring berjalannya waktu maka para tokoh-tokoh di Sulawesi Tenggara menginginkan adanya pemerintahan tersendiri dengan status Propinsi.

Berdasarkan PP No. 34/1952 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi maka untuk Sulawesi Tenggara ditetapkan 16 anggota DPRD sesuai hasil rapat yang diadakan di Raha yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi "Sudiro" yang dihadiri oleh wakil-wakil partai yang ada di Sulawesi Tenggara. Hasil dari keputusan rapat tersebut Kabupaten Sulawesi Tenggara dibagi atas 4 kewedanan yaitu: Kewedanan Buton ibukotanya Bau-Bau, 20 distrik, Kewedanan Muna ibukotanya Raha, 4 distrik, Kewedanan Kendari ibukotanya Kendari, 19 distrik. Kewedanan Kolaka ibukotanya Kolaka, 2 distrik (Gazali dkk,1992:30).

Pembentukan Muna sebagai pemerintahan semakin menemukan titik terang setelah diadakan musyawarah antar daerah se-Sulawesi Tenggara di Kendari yang dihadiri utusan dari kewedanan Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Dari musyawarah ini akhirnya disepakati bahwa Kabupaten Sulawesi Tenggara harus diperjukkan pemekarannya dengan didukung 4 daerah tingkat II yaitu: Daerah Tk II Buton ibukotanya Bau-Bau, Daerah Tk II Muna ibukotanya Raha, Daerah Tk II Kendari ibukotanya Kendari, Daerah Tk II Kolaka ibukotanya Kolaka (Gazali dkk,1992: 32)

Pada tahun 1959 Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah mengeluarkan sebuah keputusan mengenai penetapan pengangkatan kepala Daerah Tk II yang pertama di Sulawesi Tenggara yaitu sebagai berikut: La Ode Abdul Halim sebagai kepala Daerah Tk II Buton, La Ode Abdul Koedoes sebagai kepala daerah Tk II Muna, Drs. Abdullah Silondae sebagai kepala daerah Tk II Kendari, Jacob Silondae sebagai kepala daerah Tk II Kolaka (Gazali dkk, 1992:33). Setelah adanya surat keputusan ini maka remilah Muna menjadi sebuah pemerintahan administratif baru setelah diadakan pelantikan oleh Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Petta Rani, atas nama Menteri Dalam Negeri.

B. Pemerintahan Kabupaten Muna tahun 1960-2015

1. La Ode Abdul Koedoes (1960-1961)

Pada periode ini Indonesia berada pada masa orde lama yang mana Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang sekaligus merupakan proklamator Negara Republik Indonesia. Masa-masa ini Indonesia belum lama merdeka sehingga banyak terjadi berbagai gejolak namun masih dapat diatasi oleh bangsa Indonesia. Pada periode ini terdapat dua sosok pemimpin Kabupaten Muna. Periode ini adalah masa awal berdirinya Kabupaten Muna sebagai kabupaten defenitif yang menjadi bagian Propinsi Sulawesi Tenggara yang belum lama terbentuk sebagai Propinsi yang baru yang pada awalnya merupakan bagian dari Propinsi Sulselbar. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah menetapkan empat Daerah Tk II sekaligus menetapkan kepala daerahnya yaitu: La Ode Abdul Halim sebagai kepala daerah Tk. II Buton, dilantik pada tanggal 1 Maret 1960, La Ode Abdul Koedoes sebagai kepala daerah Tk. II Muna, dilantik pada tanggal 2 Maret 1960, Drs. Abdullah Silondae sebagai kepala daerah Tk. II Kendari, dilantik pada tanggal 3 Maret 1960, Jacob Silondae sebagai kepala daerah Tk. II Kolaka, dilantik pada tanggal 29 Januari 1960 (Gazali, 1992:33).

Sehingga dengan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No. 29 tahun 1959 maka Muna harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-Undang. Adapun bupati yang memimpin Kabupaten Muna yaitu La Ode Abdul Koedoes dan yang menjabat Sekda Muna yaitu Ambo Mase. La Ode Abdul Koedoes menjadi pemimpin pemerintahan Kabupaten Muna berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Beliau dilantik pada tanggal 2 maret 1960 oleh Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Andi Pangeran Petta Raci. Pemerintahan beliau sangat singkat karena hanya berlangsung 1 tahun, hal ini dikarenakan beliau terkena ledakan granat seorang anggota brimob di rumah jabatan Bupati Muna di Raha pada tanggal 13 Maret 1961 (Gazali dkk, 1992:47).

Dia memerintah sangat singkat menjadikan kurangnya program pembangunan yang dilakukan oleh Pak Abdul Koedoes terhadap Kabupaten Muna yang baru saja terbentuk sebagai kabupaten baru. Kabupaten Muna yang berstatus sebagai daerah yang masih baru dalam menjalani pemerintahan sehingga masih belum ada program mendasar yang menjadi landasan untuk menjalankan roda pemerintahan (La Oba, 2005: 140). Selama menjabat sebagai Bupati Muna ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Abdul Koedoes saat itu yaitu pembangunan mesjid di jalan Yos Sudarso dan pembangunan jembatan merah yang sebelumnya terbuat dari kayu lalu diganti dengan beton oleh La Ode Abdul Koedoes. Batu jembatan tersebut diambil dari Warangga, pengambilan batu jembatan dilakukan oleh anak-anak sekolah. Dalam menjalankan aktifitas menjadi bupati La Ode Abdul Koedoes menggunakan mobil truck karena saat itu belum ada mobil dinas bupati (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Sebagai bentuk penghargaan rakyat Muna kepada La Ode Abdul Koedoes sebagai Bupati Muna yang pertama maka nama beliau diabadikan sebagai salah satu jalan di Kota Raha. Walaupun masa pemerintahan yang begitu singkat beliau mampu melakukan pembangunan di Muna yaitu antara lain penataan Kota Raha dengan program perintisan jalan dan lorong-lorong walaupun rencana program tersebut belum sempat terealisasi karena beliau telah meninggal dunia akibat tertembak mati (La Oba, 2005: 140).

2. Pemerintahan Lettu Inf M. Thalib (1961-1965)

Kapten Inf. M. Thalib diangkat menggantikan La Ode Abdul Koedoes sebagai Bupati Muna yang kedua dan yang menjabat Sekda Kabupaten Muna yaitu Ambo Mase, dilantik pada tanggal 24 Juni 1962 (Gazali dkk, 1992: 47). Tampilnya Lettu Inf M. Thalib sebagai Bupati Muna karena meninggalnya Bupati Muna pertama La Ode Abdul Koedoes akibat terkena ledakan bom bunuh diri. Berdasarkan hal ini maka Kabupaten Muna dianggap daerah rawan sehingga pemerintah pusat mengambil langkah, yang menjadi penerus periode pemerintahan Bupati Muna pertama yaitu dari kalangan militer harapannya agar kondisi Kabupaten Muna stabil kembali dalam sistem pemerintahannya. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muna beliau menggunakan sebuah mobil dinas bupati bermerek Land Rover (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Terdapat seorang pelaksana jabatan Bupati Muna diantara Pak Abdul Koedoes dan Lettu Inf M. Thalib yaitu Malayong Daeng Liwong. Beliau menjabat Pelaksana Jabatan Bupati Muna sejak 13 Maret 1961 sampai 24 Juni 1961 ditandai dengan dilantikannya Bupati Muna yang ke dua yaitu Lettu Inf M. Thalib (Lole Mey, 1999: 16).

Kapten Inf. M. Thalib menggantikan La Ode Abdul Koedoes sebagai Bupati Muna yang kedua sebagai akibat dari kebijakan pemerintah seperti yang telah dijelaskan di atas. Pembangunan di Muna tidak banyak mengalami perkembangan yang mendasar namun salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Muna Lettu Inf M. Thalib yaitu mulai dibukanya lapangan pacuan kuda di Saungkaghito (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Pemerintahan Lettu Inf. M. Thalib hanya melanjutkan pemerintahan La Ode Abdul Koedoes yang tidak selesai dan tidak banyak melakukan pembangunan dikarenakan salah satu faktornya yaitu belum adanya program Repelita. Masa jabatan M. Thalib sebagai Bupati Muna berakhir pada tanggal 13 Juli 1965 (Gazali dkk, 1992: 47).

3. La Ode Rasyid (1965-1970)

Pada masa pemerintahan La Ute mengawali pelaksanaan program Repelita 1 (rencana pembangunan lima tahun) sehingga orientasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya berupaya memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat melalui program swasembada pangan, sehingga prioritas pemerintah adalah bertumpu pada pembangunan sektor pertanian (La Oba, 2005: 145).

Arah kebijakan pemerintah saat itu adalah berupaya mengangkat taraf hidup masyarakat melalui perbaikan sektor pertanian. Strategi Pemerintah Daerah Muna dalam menyukseskan program pemerintah adalah: pertama bidang politik; pembangunan yang dilakukan oleh La Ute dalam bidang politik yaitu menerapkan kebijakan umum yang berkaitan dengan stabilisasi aparatur daerah. Pada saat itu personil pegawai masih sangat terbatas, sehingga dengan keterbatasan ini diefektifkan pembagian kerja (*job description*) utamanya pada instansi-instansi penting yang berkaitan dengan kelancaran administrasi daerah. Melahirkan kebijakan-kebijakan yang menunjang pembangunan Kabupaten Muna (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Lembaga-lembaga yang menjadi prioritas utama adalah: Personil kesekretariatan daerah lengkap dengan bagian-bagiannya, Badan Statistik Daerah sebagai lembaga sensus, karena pada saat itu menghadapi pemilu 2 tahun 1971, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu institusi yang menata pendidikan daerah, Departemen Agama, Kehakiman sebagai lembaga hukum yang menangani kasus baik kriminal maupun kasus perdata, Lendenform (Badan Pertahanan/Agraria) yang menata kepemilikan tanah masyarakat, Personil Departemen Kesehatan yang ditempatkan dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Muna, Personil pegawai kecamatan (La Oba, 2005: 146).

Kedua bidang ekonomi; program memajukan ekonomi hubungannya dengan pertanian misalnya pemerintah memfasilitasi pembukaan lahan-lahan kebun baru yang saat itu terbangkalai sebagai akibat kondisi daerah yang tidak stabil, pemerintah berupaya memberikan motifasi kepada masyarakat mengatasi kelaparan dengan memberdayakan potensi rakyat untuk membuka perkebunan dan memberikan bantuan mengatasi hama tanaman berupa: Pengadaan racun babi (*hand sprayer*), Penjaringan babi hutan sebagai hama utama bagi petani di Muna, Kader petani desa. Dalam program memajukan industri mikro untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten

Muna pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang diantaranya yaitu: Pendidikan kader industri pertenunan tahun 1971, Pendidikan keterampilan pengasinan ikan (La Oba, 2005:147).

Ketiga infrastruktur; pembangunan dalam sektor ini yaitu antara lain pembangunan kantor DPRD Kabupaten Muna yang lama. Pembangunan rumah jabatan bupati di Lampogu yang sebelumnya juga digunakan sebagai kantor kesbang. Dibangunnya beberapa bangunan sekolah-sekolah SD sebagai penunjang dibidang pendidikan. Program pembangunan daerah dilakukan dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, bantuan kabupaten dihitung berdasarkan perkepala penduduk dizaman Suharto (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Program dalam sektor ini adalah rehabilitasi berat jalan/jembatan/deker antara Tampo-Waara yang menghubungkan antara kabupaten di Sulawesi Tenggara, *upgrading* jalan Raha-Tampo, rehabilitasi jalan/jembatan Raha-Tampo (La Oba, 2005: 147).

Keempat sektor kesehatan; sektor ini pemerintah melakukan program rehabilitasi rumah sakit kabupaten baik personil, sarana dan prasarana serta *upgrading* tenaga medis (kesehatan). Demikian sketsa pemerintahan La Ute yang berakhir setelah terpilihnya La Ode Kaimuddin sebagai bupati selanjutnya (La Oba, 2005: 147). Masa jabatan La Ute hanya berlangsung selama tiga tahun dan digantikan oleh Drs. La Ode Kaimuddin dengan status beliau yaitu Pelaksana Jabatan. Pada tahun 1975 Drs. La Ode Kaimuddin terpilih sebagai Bupati Muna yang defenitif (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Akibat kepentingan politik dimasa itu sehingga Bupati Muna La Ute digantikan oleh Drs. La Ode Kaimuddin. Setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Bupati Muna Drs. La Ute ditarik ke propinsi lalu menjabat Sekwilda propinsi Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Gubernur Ir. H. Alala. Masa pengabdian beliau berakhir melalui SK. Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7/4/47-141 tanggal 16 April 1974 (Gazali dkk, 1992: 48).

4. Pemerintahan Drs. H. La Ode Kaimuddin (1975-1981)

Sebelum menjabat sebagai Bupati Muna, Drs. La Ode Kaimuddin merupakan anggota DPRD pusat. Pada tahun 1973 Drs. La Ode Kaimuddin direkrut menjadi PJ Bupati Muna melanjutkan periode pemerintahan Drs. La Ute. Tahun 1975. Drs. La Ode Kaimuddin resmi menjadi Bupati Muna melalui pemilihan oleh anggota DPRD Kabupaten Muna. Beliau dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Edy Sabara yang langsung datang di Kabupaten Muna saat itu (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Untuk melihat sepak terjang beliau selama memerintah di Muna sebagai bupati maka perlu mengetahui secara lengkap pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh La Ode Kaimuddin. Beliau memiliki karakter khusus yang berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya maupun sesudahnya. Bidang politik; pembangunan dalam bidang politik lebih bersifat melahirkan sebuah kebijakan yang merupakan ruh dari berbagai pembangunan baik itu pembangunan dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lainnya. Dalam melakukan pembangunan dari segi pilitik Drs. La Ode Kaimuddin melahirkan berbagai kebijakan yang merupakan tulang punggung dari berbagai pembangunan yang ada misalnya untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi maka sebelum melakukan pembangunan terlebih dahulu harus melahirkan kebijakan melalui perda. Semakin banyak perda yang dilahirkan maka semakin banyak pula pembangunan fisik yang dihasilkan (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

Pembangunan yang dilakukan oleh Drs. La Ode Kaimuddin dalam bidang politik antara lain yaitu melakukan komunikasi politik antara DPRD dengan pemerintah daerah sehingga terciptalah sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Sinergi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah merupakan kunci suksesnya pembangunan di daerah meskipun suara DPRD saat itu hanya merupakan sebuah formalitas saja. Pembangunan yang dilakukan oleh Drs. La Ode Kaimuddin tidak memiliki hambatan karena dalam hubungannya dengan DPRD yang baik (La Oba, 2005:149).

Dalam menertibkan kota Raha Drs. La Ode Kaimuddin melahirkan kebijakan yang mengarah pada penataan kota yang baik. Drs. La Ode Kaimuddin dikenal sebagai pendobrak dan pengagas ketertiban kota Raha. Sedangkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat

pedesaan beliau melakukan program resettlemen dengan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk membentuk perkampungan-perkampungan pada lokasi yang telah dilewati jalan raya dan mudah hubungan transportasinya dengan kota Raha. Alasan lain yang mendasar dari program ini yaitu mengarahkan masyarakat untuk tinggal dilokasi yang tersedia air bersih agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatannya (La Oba, 2005:151).

Kebijakan yang dilakukan oleh Drs. La Ode Kaimuddin untuk mempercepat proses perkembangan pendidikan adalah membangun sarana pendidikan pada setiap desa atau lokasi perkampungan baru berdasarkan rasio kelayakannya, artinya tidak mutlak setiap desa ada sekolah tetapi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, sehingga anak-anak usia sekolah dengan mudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Untuk menunjang sarana pendidikan Drs. La Ode Kaimuddin melakukan pembangunan gedung-gedung sekolah misalnya: Membangun kantor Depdikbud sebagai penunjang administrasi pendidikan Kabupaten Muna, Mendirikan SMA Negeri 2 Raha pada tingkat SMA, Mendirikan SMP Negeri 2 Raha, SMP Negeri Matakidi, SMP Negeri Bahutara, SMP Negeri Waara, SMP Negeri Tampo, SMP Negeri Kambaara sehingga setiap kecamatan memiliki sekolah menengah pertama, Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah-sekolah negeri maka dibangunlah sekolah-sekolah swasta baik SMP maupun SMA misalnya SMP PGRI Tula, SMP Muhammadiyah Raha, SMA Muhammadiyah Raha (La Oba, 2005:152).

Pada masa pemerintahan La Ode Kaimuddin diadakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan oleh petugas-petugas kesehatan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya meningkatkan kesehatan. Didirikan Puskesmas di setiap desa-desa yang dianggap layak, beliau juga menekankan kepada masyarakat untuk membuat jamban permanen baik itu masyarakat kota maupun pedesaan. Untuk memotivasi warganya beliau mengadakan lomba desa bersih lingkungan (La Oba, 2005:153).

Kondisi ekonomi masyarakat Muna pada periode pemerintahan La Ode Kaimuddin sangat memprihatinkan karena mereka masih bertani secara tradisional/ladang berpindah-pindah. Langkah yang dilakukan oleh beliau yaitu mengubah paradigma berpikir masyarakat dari petani konsumtif menjadi petani yang produktif (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Untuk mendukung pembangunan dibidang ekonomi Drs. La Ode Kaimuddin membangun Pasar Sentral Raha yang terletak di Alun-Alun Kota Raha. Harapan dari pembangunan pasar ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Muna. Dalam rangka penertiban pasar maka penjual kaki lima yang merusak pemandangan ditertibkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu: Melalui Dinas Pertanian melakukan pembuatan sarana irigasi di Desa Wakumoro, Kolasa dan Lakandito namun program ini tidak efektif karena masyarakat Muna yang belum siap untuk bertani sawah serta belum memadainya pengetahuan mereka tentang pertanian sawah, Melalui program Pekan Penghijauan Nasional, masyarakat Muna secara keseluruhan diwajibkan untuk menanam jambu mente dengan diberikan fasilitas berupa bibit jambu mente serta diberikan intensif biaya penanaman dan pemeliharaan. Program inilah yang dianggap mampu memperbaiki ekonomi masyarakat Muna pada saat itu, Dalam mengembangkan dunia usaha bekerja sama dengan bank BRI membangun Pasar Sentral Raha untuk para pedagang, Memberikan motivasi dan dorongan moral kepada masyarakat pada setiap pertemuan khususnya masyarakat petani (La Oba, 2005:154).

5. Pemerintahan Drs. La Ode Saafi Amane

Drs. La Ode Saafi Amane adalah Bupati Muna yang ke VI menggantikan Drs. H. La Ode Kaimuddin Bupati Muna sebelumnya. Beliau terpilih sebagai Bupati Muna berdasarkan hasil pemilihan DPRD periode 1981. Dalam melaksanakan pemerintahannya beliau dibantu oleh Sekda Drs. La Ode Moh. Saliki kemudian digantikan oleh Drs. La Ode Madjid. Drs. La Ode Saafi Amane merupakan Bupati Muna yang masa kepemimpinannya di mulai pada tahun 1981 tepatnya pada tanggal 20 Maret 1981 dan berakhir pada tahun 1985 (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Muna Drs. La Ode Saafi Amane dalam bidang politik disesuaikan dengan program pemerintah propinsi yang pada saat itu posisi Gubernur

Sulawesi Tenggara dijabat oleh Ir. H. Alala dengan programnya yaitu Gerakan Desa Makmur Merata (GERSAMATA) (Gazali dkk, 1992:43). Sehingga berdasarkan program ini Bupati Muna terpilih melakukan pembangunan dalam bidang politik yaitu melakukan perubahan dalam aspek pemerintahan desa yaitu berubahnya status beberapa desa dalam lingkup kota dan ibukota kecamatan menjadi kelurahan. Akibat dari kebijakan ini maka terjadi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara besar-besaran sebagai tenaga administrasi sesuai kebijakan pemerintah pusat bahwa yang menjadi staf kelurahan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (La Oba,2005: 154).

Beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Muna Drs. La Ode Saafi Amane yaitu Merintis pembangunan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bernuansa keagamaan IAIN Alauddin Raha pada tahun 1982. Pada masa kepemimpinan beliau ini pembangunan dibidang pendidikan cukup diperhatikan sebagai bentuk realisasi dari semangat membangun pendidikan di Muna beliau mampu merintis sebuah lembaga pendidikan tinggi (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Namun setelah beliau mangkat dari jabatan terjadi berbagai kebijakan baru dan akibat adanya kebijakan ini kondisi dari IAIN yang dirintis oleh beliau mengalami perubahan nama menjadi STAIS. Pada masa pemerintahan Bupati Muna Drs. La Ode Saafi Amane banyak didirikan gedung-gedung sekolah sebagai penunjang pendidikan. Dibangun beberapa SD impres (La Oba, 2005:156).

Pengembangan wilayah kota dan pedesaan merupakan salah satu barometer dari keberhasilan serta majunya suatu daerah maka untuk merealisasikan program ini Bupati Muna Drs. La Ode Saafi Amane melakukan beberapa langkah-langkah bagi penataan desa yaitu melalui program Resetlemen. Program resetlemen ini melanjutkan program resetlemen dari Bupati Muna sebelumnya yaitu Drs. La Ode Rasyid. Dengan membuka pemukiman masyarakat baru di Guali (sekarang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat) yang diresmikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono S.H pada tahun 1985 (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Langkah beliau yang selanjutnya yaitu membuka kembali pemukiman baru di Maligano sebagai perluasan Kecamatan Wakorumba yang dipersiapkan untuk pengembangan Kecamatan Wakorumba (sekarang Kecamatan Wakorumba Utara. Tujuan dari program ini yaitu untuk mengembangkan wilayah pedesaan dan pada akhirnya perkampungan baru yang dibuka ini sekarang telah menjadi ibu kota kecamatan (La Oba,2005: 156).

Yang menjadi salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Bupati Muna ke VI Drs. La Ode Saafi Amane yaitu menjadi salah satu bupati penerima penghargaan Adipura dari pemerintah pusat karena keberhasilannya membangun wilayah pedesaan. Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono S.H yang melalui sebuah upacara resmi di Guali pada tahun 1985. Kemudian Drs. La Ode Saafi Amane pernah dianugerahi penghargaan Prasamya Karya Nugraha yang terbuat dari emas murni yang dibawa langsung dari pusat oleh Mentri Gafur (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018)

Salah satu budaya yang dimiliki oleh Muna yaitu tradisi perkelahian kuda (*pogiraha adhara*) dan pacuan kuda, hal ini telah menjadi icon bagi masyarakat muna yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Menyadari akan pentingnya untuk selalu melestarikan budaya lokal karena ada pepatah mengatakan bahwa budaya yang besar akan melahirkan bangsa yang besar pula, maka Bupati Muna ke VI Drs. La Ode Saafi Amane melakukan beberapa langkah penting. Adapun langkah langkah yang beliau lakukan yaitu menghidupkan kembali tradisi perkelahian kuda dan pacuan kuda sebagai simbol dan lambang daerah Kabupaten Muna (La Oba,2005: 156). Sebagai realisasi dari program ini beliau membangun arena pacuan kuda yang berlokasi di Punto dan Saungkaghito, tetapi situs sejarah ini tinggal kenangan yang terlupakan oleh hampir semua orang padahal kalau masyarakat dan pemerintah yang berwawasan budaya seharusnya situs ini tetap dilestarikan karena mengandung nilai-nilai budaya dan juga merupakan sarana wisata budaya yang dapat menarik wisatawan sehingga mampu memberikan pemasukan bagi daerah khususnya masyarakat pada umumnya seperti budaya Matador di Spanyol. Itulah beberapa program yang dilaksanakan oleh Bupati Muna ke VI Drs. La Ode Saafi Amane baik yang direalisasikan maupun yang tidak akibat telah berakhirnya masa jabatan beliau (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

6. Pemerintahan Drs. Maola Daud

Drs. Maola Daud merupakan Bupati Muna yang ke VII menggantikan bupati sebelumnya, beliau terpilih sebagai Bupati Muna berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh legislatif Kabupaten Muna dan dilantik pada tanggal 17 Maret 1986 oleh DPRD Kabupaten Muna. Pada masa pemerintahan beliau yang menjabat sekretaris daerah yaitu Drs. La Ode Nsaha. Sebelum menjadi Bupati Muna Drs. Maola Daud pernah menjabat sekretaris daerah di Kabupaten Kolaka. Pada periode ke dua yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Muna yaitu Drs. M. Yasat (Gazali dkk, 1992:49). Drs. Maola Daud menjadi Bupati Muna pada periode ke dua tidak selesai karena beliau tampil sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara dan yang menjadi lawannya yaitu Drs. La Ode Kaimuddin. Pada tahun 1993 beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Muna karena menjadi salah satu kandidat calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Drs. Maola Daud merupakan salah satu Bupati Muna yang memiliki jiwa membangun bagi daerah yang dipimpinya hal ini dibuktikan dengan berbagai program yang beliau lakukan. Sehingga akibat dari jiwa membangun yang beliau lakukan maka dalam sejarah Kabupaten Muna beliau dikenal dan dikenang sebagai salah satu bupati yang memiliki keberhasilan gemilang dalam segi pembangunan Kabupaten Muna. Hal ini pulalah yang mengantarkan beliau menjabat posisi Bupati Muna selama dua periode secara berturut-turut.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang mutlak bagi suatu daerah dan merupakan suatu kewajiban paling mendasar bagi seorang pemimpin ketika memimpin. Melihat sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Muna maka Drs. Maola Daud memberikan bantuan terhadap masyarakat Muna antara lain sebagai berikut: Membangun pabrik tehel dan genteng pada daerah-daerah yang terdapat kapur seperti di Desa Lapadaku, Desa Lindo, Desa Latugho, Desa Bungi dan Kelurahan Wapunto. Pada awal pemberian bantuan pabrik ini beroperasi dengan baik namun beberapa tahun kemudian sudah tidak beroperasi lagi karena berbagai faktor diantaranya sumberdaya manusia yang belum mampu mengelola industri tersebut sehingga peralatan yang diberikan hanya menjadi besi tua yang tidak bermanfaat, Membangun pabrik tapioka pada daerah-daerah yang memiliki kebun ubi kayu misalnya di Desa Lahorio, Desa Lindo, Desa Konawe dan Desa Wuna, Melihat potensi jambu mete yang dimiliki oleh Muna maka diberikanlah bantuan berupa pengupas mete agar masyarakat menjual jambu metenya sudah dalam bentuk olahan sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Muna disisi lain hal ini mampu menyerap tenaga kerja serta pemberdayaan industri rumah tangga yang baik. Daerah-daerah yang masih bisa dijumpai akibat dari penerapan program ini antara lain di Wakuru Kecamatan Tongkuno, masyarakat Desa Bone, dan Desa Kontunaga, Pemberian bantuan alat tenun bagi masyarakat yang memiliki kerajinan tenun seperti di Desa Bolo, Desa Masalili, Desa Kondongia dan Desa Waara, Pelestarian dan pengembangan kerajinan anyam nentu bagi masyarakat Desa Korihi, Lohia, Wabhinting, mantobua, Program pemindahan pasar Laino, Pemberian bantuan alat penggiling jagung dan pemisah biji jagung dari tongkolnya serta alat pembuka biji kacang (La Oba, 2005: 159).

Dalam melakukan pembangunan dibidang politik Drs. Maola Daud menyesuaikan dengan program pemerintah pusat karena pada masa itu beliau masih berada dalam era orde baru. Yang menjadi program pemerintah pusat yaitu repelita. Tidak banyak yang dilakukan oleh beliau dalam bidang ini namun suatu hal dianggap sukses yaitu beliau mampu mengawal jalannya pemerintahan di Muna selama dua periode kepemimpinannya. Tidak adanya gejolak politik yang berlebihan dan sebagainya (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Dalam membangun di bidang politik beliau melakukan kebijakan penataan aparatur birokrasi pemerintahan daerah sehingga terdapat keselarasan dalam menjalankan roda pemerintahan di Muna.

Selama masa jabatan Bupati Muna ke VII Drs. Maola Daud pembangunan dalam bidang pendidikan sangat diperhatikan hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan dalam bidang ini antara lain sebagai berikut: Mendirikan perguruan tinggi swasta STIP Wuna yang diwadahi oleh Yayasan Pemerintah Daerah, Mendirikan sekolah Akademi Keperawatan yang diwadahi Yayasan Mandala Waluya namun kemudian dipindahkan di Kendari tahun 1991,

Menfasilitasi pendirian Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMPT) Guali pada tahun 1992, Mendirikan Sekolah Dasar (SD) pada daerah-daerah terpencil misalnya daerah Tongkuno Lama, Mendirikan asrama mahasiswa Muna di beberapa daerah misalnya asrama mahasiswa Muna di Makassar, Kendari, dan Gorontalo (La Oba, 2005: 160).

Sebagai bentuk kepedulian Bupati Muna Drs. Maola Daud dalam bidang keagamaan untuk menjadikan masyarakat Muna yang taat beragama, beriman dan bertakwa beliau melakukan beberapa pembangunan yaitu: Membangun kembali mesjid Kota Muna yang telah ditinggalkan dan mengaktifkan kembali susunan personil pegawai Syarah di mesjid mengacu pada personil pegawai Syarah kerajaan yang terdiri dari Imamuno Wuna, Hatibino Wuna, Modhino Ghoera (terdiri dari Midhino Tongkuno, Modhino Lawa, Modhino Kabhawa, Modhino Katobu), Modhi Anahi. Pembangunan ini dimulai sejak tahun 1988, Pembangunan pesantren Khairul Ummah Guali pada tahun 1990, Penyelesaian pembangunan mesjid agung Almunawarah (mesjid raya Raha) yang dimulai pembangunannya sejak pemerintahan Drs. La Ode Saafi Amane dan pembangunannya diselesaikan oleh Drs. Maola Daud, Pembangunan mesjid di Masalili dan Mabhodo serta pemberian bantuan pembangunan mesjid di beberapa desa lain di Kabupaten Muna, Pembangunan mesjid Baitul Makmur di depan alun-alun Kota Raha (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Pembangunan dalam bidang sosial budaya dilakukan melalui RAPBD setiap tahun yang kemudian diaktualisasikan dalam beberapa program yaitu: Pemberian bantuan pada panti asuhan dan program pemberdayaan orang-orang cacat melalui keterampilan yang dimilikinya misalnya tukang jahit, tukang arloji, tukang cukur, dan keterampilan lainnya, Mengaktifkan kembali kerajinan masyarakat misalnya kerajinan pertukangan, kerajinan anyaman nentu, kerajinan tenun di Lohia, Masalili dan Kondongia, Pemberian fasilitas pertukangan dan pelatihan sebagai penunjang keterampilan generasi muda, Pembangunan taman perahu Sawerigading di belakang kantor Bappeda (Wawancara dengan Kepala Museum Kabupaten Muna Pak Hadi). Selama menjabat sebagai Bupati Muna Drs. Maola Daud terjadi beberapa pembangunan infrastruktur sebagai berikut: Kantor DPRD Kabupaten Muna, Kantor Sospol Kabupaten Muna, Kantor Perhubungan Kabupaten Muna, Kantor Camat Katobu Kabupaten Muna, Kantor BPD Kabupaten Muna yang lama, Kantor PMD Kabupaten Muna, Kantor PDAM Kabupaten Muna (La Oba, 2005:162).

7. Pemerintahan Kol. Saleh Lasata

Setelah pemerintahan Drs. Maola Daud terjadi beberapa kali pergantian Bupati Muna dengan status PLH. Terdapat tiga orang Pelaksana Harian Bupati Muna yaitu Drs. Saafi Amane, Drs. La Ode Saleh kemudian Ahmad Jamaludin. Banyaknya pelaksana harian ini berakibat pada pembangunan Kabupaten Muna yang terhambat. Situasi politik yang tidak mendukung berimbas pada mandeknya pembangunan. Munculnya pelaksana harian bupati ini bukannya membangun namun menghancurkan apa yang telah dibangun oleh bupati-bupati sebelumnya misalnya: Penghancuran tugu berbentuk akar gembol, buah jambu, burung garuda, Simbolik perahu Sawerigading yang terletak di belakang kantor bupati juga dibongkar, Lembaga pendidikan tinggi Akper yang beroperasi di Raha dipindahkan ke Kendari (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018).

Pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Muna Kol. Saleh Lasata yaitu melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya seperti melanjutkan pembangunan pasar sentral Laino serta meresmikannya sebagai salah satu pusat ekonomi bagi Kabupaten Muna serta masyarakatnya. Setelah terjadi kebakaran pasar dua kali (pasar lama yang terletak di alun-alun Kota Raha sekarang) masyarakat secara spontan pindah di pasar sentral Laiono sekarang ini. Posisi pasar Laino sangat menguntungkan sebagai aktifitas perekonomian karena dekat dengan dermaga sehingga masyarakat seberang sangat positif bagi ekonomi Kabupaten Muna dan hal ini juga merupakan salah satu upaya pengembangan kota Raha (Sepertinya sumbernya sama dengan wa Lisa).

Memasnya suhu politik di Muna yang semakin tinggi berakibat pada tidak terealisasinya program-program yang diupayakan oleh pemerintah. Konflik politik yang masih terus berlanjut

pasca pemerintahan Maola Daud sehingga pemerinthan Kol. Saleh Lasata melakukan pembenahan aparatur sebagai prioritas pemerintah saat itu. Pemerintahan Kol. Saleh Lasata berorientasi pada ekonomi kerakyatan namun program ini gagal disebabkan oleh belum siapnya masyarakat menerima program semacam itu (Wawancara dengan La Ode Sirat Imbo, 7 September 2018). Pemerintahan Kol. Saleh Lasata hanya berlangsung dua tahun karena beliau hanya melanjutkan program-program yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan yang begitu singkat mengakibatkan tidak terrealisasinya program-program yang telah beliau rencanakan.

8. Pemerintahan Kolonel Inf. H. Djamaluddin Bedu

Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu muncul sebagai Bupati Muna yang defenitif menggantikan Kolonel Saleh Lasata. Pemerintahan Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu tidak berlangsung lama kurang lebih satu tahun saja. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik nasional yaitu lahirnya era Revormasi menggantikan orde baru yang hampir semua pimpinan daerah pada masa orde baru berasal dari kalangan militer. Walaupun terjadi pemilihan namun hanya merupakan formalitas saja. Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu muncul sebagai bupati diakhir orde baru sehingga ketika orde baru digantikan revormasi maka muncullah kebijakan bahwa militer tidak boleh lagi menjabat jabatan di pemerintahan dan dikembalikan sebagaimana fungsinya yang semestinya. Pemilihan Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu oleh DPRD menuai konflik pada rakyat Kabupaten Muna sehingga kantor DPRD Kabupaten Muna sempat diduduki rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat Kabupaten Muna tidak menginginkan Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu menjabat Bupati Muna (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018). Pemerintahan Kol. Inf. H. Jamaludin Bedu yang sangat singkat sehingga tidak ada pembangunan yang beliau lakukan untuk Kabupaten Muna. Disisi lain yang menjadi alasan tidak adanya pembangunan yaitu kondisi politik nasional saat itu yang kurang kondusif. Kolonel. Inf. H. Jamaludin Bedu memilih kembali pada institusi tempat beliau mengabdikan yaitu ABRI dan beliau juga berjasa karena mampu menyukseskan pemilihan bupati selanjutnya yang akan memimpin Kabupaten Muna dengan aman, damai tanpa ada intervensi dari militer. Pemilihan bupati sebelumnya selalu di dominasi oleh Golkar tetapi setelah diadakannya pemilihan umum Golkar hanya memperoleh 16 kursi, PDIP 4 kursi, PDI 1 kursi, PPP 2 kursi, PARI 1 kursi, PKB 1 kursi, PAN 2 kursi, ABRI 3 kursi (Kesbang 2018).

9. Pemerintahan Ridwan. BAE

Pada bulan September tahun 2000, wakil-wakil rakyat Kabupaten Muna yang telah mendapat amanah dari rakyat melakukan tugas perdana untuk memilih eksekutif yang memimpin Kabupaten Muna hingga September tahun 2005. Dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut terdapat tiga calon dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas tiga pasangan calon yang akan dipilih oleh anggota DPRD dengan sistem pemilihan dua kandidat yang memperoleh suara paling banyak pertama dan terbanyak kedua yang akan maju pada tahap ke dua. Peserta pemilihan tahap pertama ini yaitu Ridwan BAE berpasangan dengan Drs. Syarif Arifin Sungkusara, Drs. Laskar Kudus berpasangan dengan Kol. Pol. Haemuldi. Setelah dilakukan pemilihan maka yang memenangkan pemilihan tahap pertama yaitu pasangan Ridwan BAE dan Drs. Syarif Arifin Sungkusara sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama kemudian pasangan Drs. Laskar Kudus dan Kol. Pol. Haemuldi memperoleh suara terbanyak ke dua (La Oba, 2005: 171).

Setelah pemilihan tahap pertama dilakukan dengan munculnya dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak ke dua maka dilakukanlah pemilihan tahap kedua dengan kandidatnya yaitu Ridwan BAE dan Drs. Syarif Arifin Sungkusara serta Drs. Laskar Kudus dan Kol. Pol. Haemuldi. Sebanyak tiga puluh orang anggota DPRD Kabupaten Muna memilih dan yang memenagkan pertarungan politik tersebut yaitu pasangan Ridwan. BAE dan Drs. Arifin Sungkusara dengan perolehan suara sebanyak enam belas suara kemudian pasangan Drs. Laskar Kudus dan Kol. Pol. Haemuldi memperoleh suara sebanyak empat belas suara (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

Setelah menjabat sebagai Bupati Muna hal pertama yang beliau lakukan yaitu penataan tata ruang Kota Raha yang diarahkan sebagai daerah perdagangan maka dibangunlah Pasar Laino. Yang menjadi pertimbangan Bupati Muna Ridwan. BAE bahwa sebenarnya beliau mau

mengarahkan pembangunan dibagian atas (menuju kampung lama) tetapi disana penuh dengan permasalahan sehingga beliau berpikir untuk menimbun pantai. Hal ini akan meminimalisir persoalan, karena jika sebuah pembangunan menghadapi permasalahan maka biasanya akan menjadi kendala dalam pembangunan. Maka akibat dari pertimbangan ini beliau masuk menimbun laut sehingga terciptalah berbagai pembangunan yang ada (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

Kemajuan pendidikan suatu daerah merupakan simbol kemajuan daerah itu sendiri. Mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan daerah maka Bupati Muna Ridwan. BAE melakukan beberapa pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam bidang pendidikan. Pembangunan yang bersifat non fisik yaitu mengalokasikan dana APBD untuk meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Muna dengan memberikan peluang pada setiap instansi untuk mengikuti program Pasca Sarjana. Program ini dikenal dengan istilah gerakan 2001 hingga akhirnya banyak PNS Pemda Kabupaten Muna yang melanjutkan studi program S2 (Wawancara dengan Ridwan.BAE, 14 Oktober 2018).

Sebagai langkah awal dalam pembangunan di bidang pendidikan yaitu Ridwan. BAE dari segi pemerintahan memekarkan beberapa kecamatan dalam rangka mempercepat perluasan pembangunan seperti Kecamatan Lawa mekarkan Kecamatan Barangka, Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Watuputi, untuk wilayah sebrang misalnya dari tiga kecamatan dimekarkan menjadi sebelas kecamatan dan melalui DPRD program ini diloloskan. Dari semua kecamatan yang di mekarkan itu kemudian kita tempatkan SMA, SMP, dan SD. Dalam pemerintahan Ridwan. BAE pembangunan dari segi pendidikan hampir semua sarana fisik terbangun, sekolah-sekolah direhab dari dana DAK (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

Berbagai pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Muna Ridwan. BAE dalam bidang pendidikan yang berupa fisik yaitu mendirikan sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan antara lain pada jenjang SMA yaitu SMA Khusus, SMA Wasolangka, SMA Kabangka, SMA Maginti, SMA Sawerigadi, SMA Loghia, SMA Tampo, SMA Pola, SMA Pure, SMA Wakorut, SMA Labuan, SMA Kulisusu Utara, SMA Bone Gunu, SMA Waode Buri. Pembangunan beberapa sekolah menengah pertama antara lain yaitu SMP Negeri 8 Raha, SMP Negeri 10 Katobu, SMP Negeri Maginti/4 Tikep, SMP Negeri 4 Kabawo, SMP Negeri 3 Tongkuno, SMP Negeri 9 Katobu, SMP 2 Wakorut (La Oba, 2005:174).

Pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Muna Ridwan. BAE dari segi kesehatan yaitu setelah dimekarkannya kecamatan-kecamatan maka disetiap kecamatan itu dibuatkan puskesmas sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terlayani semua (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018). Pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam bidang kesehatan adalah membangun puskesmas pada setiap kecamatan sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat melalui dana alokasi umum (DAU). Kemudian dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Muna yang profesional, maka pemerintah melakukan program kontrak tenaga ahli berdasarkan survey terhadap kebutuhan paling penting maka yang menjadi kebutuhan sangat penting saat itu yaitu dokter ahli kandungan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muna mengontrak dokter ahli kandungan. Demi untuk meningkatkan sumber daya tenaga medis maka pada tahun 2004 Kabupaten Muna mendirikan Lembaga Pendidikan Kesehatan setingkat D.III yaitu Akademi Keperawatan Kabupaten Muna (AKPER). Lalu kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Muna juga mendirikan beberapa puskesmas antara lain sebagai berikut: Pembangunan Puskesmas Maginti di Pajala, Pembangunan Puskesmas Waara, Pembangunan Puskesmas Bonegunu di Koko, Pembangunan Puskesmas Wakorumba Utara, Pembangunan Puskesmas Labuan (Wawancara dengan Ridwan. BAE, 14 Oktober 2018)

Kepemimpinan Ridwan. BAE pembangunan dalam bidang kebudayaan yaitu: Melestarikan kain tenun khas Muna dengan cara menganjurkan pada setiap Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk memakai baju kain tenun Muna pada hari Sabtu jam kantor. Melakukan sosialisasi dan publikasi tenunan daerah pada event MTQ tingkat propinsi yang diselenggarakan di Muna tahun 2002, Publikasi kerajinan daerah pada event nasional di Bali,

Jakarta seperti hasil tenunan, kerajinan gembol, kerajinan nentu serta tarian tradisional, Pelestarian Kabhanti Wuna, seni pukul gong pada setiap perayaan hari-hari besar nasional, Membudayakan makanan khas Muna (La Oba, 2005:180). Pembangunan dalam segi budaya juga salah satunya yaitu pernah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menganggarkan untuk pembentukan Dewan Adat Kabupaten Muna tetapi pada saat itu tidak berhasil dilahirkan karena situasi politik pada saat itu sangat tidak memungkinkan karena ada saling ketidakpercayaan diantara para pemangku-pemangku baik di legislatif maupun dieksekutif. Tidak dilahirkan walaupun sudah dianggarkan kemudian pembangunan Mesjid Muna walaupun bersifat keagamaan tetapi berhubungan dengan budaya (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

Pembangunan yang dilakukan oleh Ridwan. BAE dalam bidang keagamaan yaitu membangun mesjid tengal laut. Pada tahun 2002 ketika Muna menjadi tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat propinsi, pemerintah mengintrusikan semua masyarakat Muna yang memasuki arena MTQ harus mengenakan busana muslim. Pada tahun 2003-2004 merenofasi mesjid Kota Muna yang dilengkapi dengan perumahan Pegawai Syara dengan ciri khas rumah Adat Muna. Terbentuknya wadah pembinaan keagamaan bagi kaum perempuan melalui majelis ta'lim yang dikenal dengan istilah Badan Kontak Majelis Ta'lim (BMKT) dan program pembangunan siar islam melalui kegiatan yasinan setiap malam jum'at di Rumah Bupati Muna Ridwan. BAE (La Oba,2005:181).

Mekarnya Kabupaten Buton Utara dari Kabupten Muna terjadi pada tahun 2008 yang didukung 6 kecamatan yaitu Kecamatan kulisusu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Wakorumba Utara dan Kecamatan Kambowa (Wawancara dengan Uking Djasa, 14 Oktober 2018). Lahirnya Kabupaten Buton Utara tidak terlepas dari program pemekaran kecamatan yang dilakukan oleh Bupati Muna Ridwan. BAE karena sebagai syarat lahirnya sebuah kabupaten baru harus memiliki 3 kecamatan dalam wilayah administratifnya walaupun dalam perjalanannya harus memiliki 5 kecamatan. Program pemekaran yang dilakukan oleh Bupati Muna Ridwan. BAE secara tidak langsung telah menjadi penopang mekarnya Kabupaten Buton Utara dari Kabupaten Muna (Wawancara dengan Ridwan. BAE, 14 Oktober 2018).

Wacana mekarnya Buton Utara terjadi pada periode pemerintahan Ridwan. BAE. Sebelum dilakukan pemekaran sebenarnya pada masyarakat telah ada benih-benih dan ide-ide untuk mekarnya Buton Utara. Yang menjadi dasar utama mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna yaitu sangat jauhnya jangkauan rentang jarak antara ibu kota kabupaten sehingga pelayanan pemerintahan sangat jauh untuk dijangkau. Dasar kedua yaitu luas wilayah Kabupaten Buton Utara yang layak untuk dimekarkan sebagai kabupaten baru bahkan wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Utara lebih luas dari Kabupaten Muna. Dalam segi pembangunan akibat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sehingga pembangunan yang terjadi di Buton Utara sangat tidak maksimal. Poin-poin inilah yang menjadi alasan utama mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna. Yang menjadi PJ Bupati Buton Utara pada awal terbentuknya yaitu Ridwan Zakaria menjabat sampai pada pemilihan umum (Wawancara dengan La Ode Tanda, 26 September 2018).

10. Pemerintahan dr. Baharudin. M.kes

Setelah pemerintahan Ridwan. BAE maka terjadi pemilihan umum untuk menentukan Bupati Muna yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Kandidat yang bertarung saat itu adalah dr. Baharudin. M.kes berpasangan dengan Malik Ditu, Rusman Emba. ST berpasangan dengan Haridin dan La Ode Gawu setelah dilakukan pemilihan terjadi persaingan ketat antara pasangan dr. Baharudin. M. Kes, Malik Ditu dan pasangan Rusman Emba. ST, Haridin. Yang memenangkan pertarungan adalah pasangan dr. Baharudin. M. Kes dan Malik Ditu dengan perbedaan suara kurang lebih 10 ribu suara.

Dr. Baharudin. M. Kes resmi menjadi Bupati Muna sejak 16 September 2010 sampai 16 September 2015. Beliau menjabat bupati bulan September masa periode APBD perubahan. Karena periode APBD perubahan maka tidak banyak program pembangunan yang dilakukan namun hanya menyesuaikan anggaran yang ada. Program yang diprioritaskan pada periode APBD perubahan ini

adalah ada sebuah kegiatan dengan nama kegiatan yaitu Survei Sepuluh Besar Masalah Kabupaten Muna. Melalui survei ini maka lahirlah Sepuluh Besar Masalah Kabupaten Muna. Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yaitu 350 juta. Konsultan yang didatangkan ini dari Bappenas bernama DR. Agus Sunaryo.

Masalah utama yang dirumuskan oleh DR. Agus Sunaryo terhadap Kabupaten Muna yaitu melahirkan peta masalah dalam sepuluh item namun setelah melalui berbagai pertimbangan maka diseleksi lagi masalah yang paling mendasar. Lima masalah yang paling krusial tersebut yaitu: Lapangan kerja yang terlalu sulit atau kurang, Masalah jalan, jembatan, sarana transportasi, termasuk pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu dan lain-lain, Masalah air bersih dan listrik, Masalah pasar, Masalah rumah sakit. Masalah jalan, jembatan sudah sesuai dengan anggaran yang kita maksimalkan 70% anggaran ini dialokasikan ke desa-desa untuk jalan, jembatan, dan lain-lain. Wujud dari program ini maka muncullah pelabuhan tambatan perahu di Pajala, Maginti, Towea dan pesisir-pesisir lain. Pada awal pemerintahan dr. Baharudin. M. Kes kondisi jalan hanya yang bagus hanya sekitar 30% setelah lima tahun menjabat Bupati Muna kondisi jalan yang bagus sekitar 70%.

Salah satu jembatan yang dibangun oleh dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes yaitu pelabuhan yang menghubungkan Pure dan Lagasa yang sekarang ini telah dioperasikan. Pembangunan jalan dua jalur yang menghubungkan Mantobua-Wakuru dengan lebar jalan 40 meter, jalan ini diperuntukkan untuk dilalui mobil trek-трек dari Bau-Bau ke Raha agar tidak merusak jalan lain. Alasan pembukaan jalan penghubung ini juga diharapkan nanti setelah mekar Kota Raha maka Kabupaten Muna akan berpusat di Kampung Lama Tongkuno maka mobil-mobil yang barang yang dari Bau-Bau ke Raha bisa dipersingkat disisi lain hal ini akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Kabupaten Muna.

Masalah air bersih dan listrik merupakan masalah paling mendasar bagi masyarakat Kabupaten Muna. Masalah listrik, listrik merupakan kewenangan PLN tapi pemerintah daerah hanya koordinasi dengan PLN. Program ini antara lain pengadaan modul-modul listrik tenaga surya untuk daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau termasuk di SOR, Kampung Lama juga termasuk. Hanya pengadaan modul tenaga surya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk masalah listrik merupakan kewenangan PLN pemerintah hanya mengusulkan ke PLN dan koordinasi ini pemerintah menginginkan agar listrik dari Buton masuk di Kabupaten Muna. Masalah air bersih yang menjadi persoalan yaitu sumber air bersih yang sulit maka program ini lebih pada memberikan dukungan terhadap PDAM Kabupaten Muna dan program yang menyentuh masyarakat pedesaan adalah bantuan sumur gali.

Wacana mekarnya Muna Barat juga terjadi pada masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan. BAE walaupun terlaksana pada masa pemerintahan dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes. Setelah Buton Utara mekar maka Muna Barat juga ikut menggaungkan untuk mekar sebagai Daerah Otonomi Baru namun hal ini sangat tidak mungkin dalam satu periode memekarkan dua kabupaten baru. Sehingga pada saat itu Muna Barat diikutkan dengan Kota Raha untuk pemekarannya. Yang menjadi ketua pemekaran Muna Barat yaitu Nurdin Olo dan sekertarinya yaitu La Ode Aca serta ketua pembentukan Kota Raha yaitu dr. H. L. M. Baharuddin m. Kes (Wawancara dengan Kepala Museum Kabupaten Muna).

Setelah mencuatnya kembali pemekaran Muna Barat maka Bupati Muna dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pemekaran Muna Barat. Posisi Bupati Muna saat itu memberikan dukungan dari belakang dan yang bergerak didepan yaitu panitia pemekaran Muna Barat walaupun dalam perjalanannya panitia mengalami masalah dan akhirnya terjadi demonstrasi di Muna Barat yang berpusat di Tugu Lagadi (Wawancara dengan La Ode Baharuddin, 2 Oktober 2018).

Forum Percepatan Pemekaran Muna Barat (FPPM) melakukan demonstrasi, memacetkan setiap aktifitas ekonomi dengan cara menutup jalan sehingga aktifitas ekonomi terhambat. Gerakan yang dilakukan oleh Forum Percepatan Pemekaran Muna Barat selalu dilakukan bersamaan dengan Barisan Muda Muna Barat. Gerakan yang dilakukan oleh Barisan Muda Muna Barat yaitu berpusat di kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari gerakan ini yaitu mengawal setiap rapat yang dilakukan oleh Komisi II agar pemekaran Muna Barat segera dilakukan. Gerkan ini pula

sempat menduduki kantor DPRD Propinsi kurang lebih selama 1 bulan (Wawancara dengan La Ode Agus, 17 Oktober 2018).

Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Muna Barat saat itu sangat menghambat aktifitas ekonomi Kabupaten Muna karena masyarakat bermukim di Tugu Lagadi dan kendaraan-kendaraan ditahan. Sehingga Bupati Muna dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes turun bertemu dengan warga yang melakukan aksi sehingga tercapailah sepakat bahwa pemekaran Muna Barat diambil alih oleh bupati dan saat itu juga dilakukan penanda tanganan sebuah piagam mengenai pemekaran Muna Barat (Wawancara dengan La Ode Baharuddin, 2 Oktober 2018).

Tokoh-tokoh yang berperan penting memberikan bantuan baik bersifat moral maupun materi yaitu antara lain L. M. Rusman Emba yang menjabat Ketua DPRD Propinsi saat itu, L. M. Taufan Besi, La Nika saat itu sebagai anggota DPRD Propinsi, L. M. Syarif Andi Muna dan masih banyak lagi (Wawancara dengan La Ode Agus, 17 Oktober 2018). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan warga Muna Barat maka Bupati Muna dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes bersama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara menghadap kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi II yang saat itu Ketua Komisi II dijabat oleh Agung Gunanjar. Setelah itu terjadi beberapa kali ekspose mengenai mekarnya Muna Barat (Wawancara dengan Edy Huga, 10 September 2018).

Setelah melalui perjalanan yang panjang maka Muna Barat resmi dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru. Yang menjabat Pelaksana Jabatan Bupati Muna Barat saat itu adalah Drs. La Ode Muhammad Rajiun Tumada melalui UU No. 14 tahun 2014. Beliau dilantik di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri pada September 2014. Dalam pelantikan ini turut hadir Bupati Muna, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Dandim, Kapolres memberikan dukungan pada Muna Barat (Wawancara dengan La Ode Baharuddin, 2 Oktober 2018).

PENUTUP

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Kabupaten Muna terbentuk pada tahun 1959 melalui Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Melalui ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan kepala Daerah Tk II Muna yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus sebagai Bupati Muna yang pertama. (2) Pemerintahan Kabupaten Muna dalam perjalanannya selama 56 tahun telah mengalami 11 kali pergantian bupati sampai tahun 2015. Bupati-bupati yang pernah menjabat yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus, Lettu Inf. M. Thalib, Drs. La Ode Rasyid, Drs. La Ute, Drs. La Ode Kaimuddin, Drs. La Ode Saafi Amane, Drs. Maola Daud, Kol. Saleh Lasata, Kol. Inf. H. Djamaluddin Bedu, Ridwan. BAE, dan dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes. (2) Pada masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan. BAE terjadi pemekaran wilayah yaitu mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna dan pada masa pemerintahan dr. H. L. M. Baharuddin. M. Kes juga terjadi pemekaran yaitu mekarnya Muna Barat dari Kabupaten Muna Induk.

DAFTAR PUSTAKA

- Couvreur, Jules. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Kupang: Artha Wacana Press.
- Dasri, dkk. 2012. *Nilai-Nilai Budaya dan Sejarah Daerah Kabupaten Muna*. Yogyakarta: Araska.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gazali, dkk. 1992. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah TK.1 Sulawesi Tenggara*. Universitas Halu Oleo.
- Hasrita, Rita. 2006. "Perkembangan Kabupaten Kendari Tahun 1964-2003". Skripsi, Kendari: FKIP Unhalu.
- Hugiono dan P.K. Poerwantana 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bina Aksara.
- Ismail, 2015. "Sejarah Pembentukan Kabupaten Wakatobi (1952-2003)". Skripsi, Kendari: FKIP UHO.
- Kuntowijoyo, 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- La Oba, 2005. *Muna Dalam Lintasan Sejarah (Prasejarah-Era Reformasi)*. Bandung: Sinyo M.P
- Leirissa, R.Z. 1996. *Historiografi Umum (Program Magister Ilmu Sejarah, UI)* Jakarta: UI Press.

-
- Mansyur, 2013. "Sejarah Pembentukan Kabupaten Bombana (1948-2003). Skripsi, Kendari: FKIP UHO.
- Miswar, 2008. "Perkembangan Struktur Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Suatu Tinjauan Politik)". Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mulyani, Nani, dkk. 1995. *50 Tahun Indonesia Merdeka Jilid I (1945-1965)*. Jakarta: Citra Media Persada.
- Poerwardarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: ombak.
- Supartono, Widyosiswoyo. 2006. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Supriyadi, dkk. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tamburaka, Rustam, E, dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*. Jakarta: Inco.